

ANALISIS PROPAGANDA ANTI TIONGKOK SEBAGAI ANTISIPASI POTENSI KONFLIK SOSIAL PASCA MENINGKATNYA KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA-TIONGKOK

Ahmad Maryo Suganda¹, Sundawan Salya², A.V. Rahajeng Widya³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Bogor, Indonesia

Email: ahmadmaryo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi propaganda anti Tiongkok terhadap kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok dan menjelaskan bagaimana upaya deteksi dini yang dapat dilakukan guna mencegah potensi konflik sosial akibat propaganda anti Tiongkok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia dinilai kuat dan merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Propaganda anti Tiongkok di Indonesia saat ini telah mereda jika dibandingkan dengan situasi pada 1998 namun dinilai masih mudah disulut di tengah masyarakat. Propaganda anti Tiongkok tidak terlalu mengganggu proses kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok, namun pihak Pemerintah Tiongkok pernah menyatakan keberatan. Perlu diwaspadai pihak-pihak yang berpotensi menjadi aktor propaganda diantaranya kelompok kepentingan, kelompok konservatif yang berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, buruh dan NGO dari negara yang berkedudukan sebagai rival dari Tiongkok. Berdasarkan hasil studi literatur juga menunjukkan bahwa propaganda anti Tiongkok di Indonesia dapat dinilai sebagai *proxy war* dari rivalnya dalam geopolitik, yaitu Amerika Serikat. Ancaman propaganda anti Tiongkok dapat digolongkan pada tingkatan minor, namun tetap perlu diantisipasi, dideteksi dan dicegah secara dini karena dapat berkembang menjadi massif dan memicu konflik sosial.

Kata Kunci: Propaganda, Anti-Tiongkok, Ekonomi, Deteksi Dini, Konflik Sosial.

Abstract

This research aims to inform anti-Chinese propaganda regarding Indonesia-China economic cooperation and explain how early detection efforts can be made to prevent potential social conflict due to anti-Chinese propaganda. The research method used is descriptive qualitative in depth through interviews with predetermined sources. The research results show that China's economic influence on Indonesia is considered strong and it is Indonesia's largest trading partner. Anti-Chinese propaganda in Indonesia has now subsided compared to the situation in 1998 but is still considered easy to ignite in society. Anti-Chinese propaganda is too disruptive to the Indonesia-China economic cooperation process, but the Chinese government has expressed objections. It is necessary to be wary of parties who have the potential to become propaganda actors, including interest groups, conservative groups affiliated with certain political forces, workers and NGOs from countries that are rivals to China. Based on the results of the literature study, it also shows that anti-Chinese propaganda in Indonesia can be seen as a proxy war from its geopolitical rival, namely the United States. The threat of anti-Chinese propaganda can be classified at a minor level, but it still needs to be anticipated, detected and prevented early because it can develop into a massive one and trigger social conflict.

Keywords: Propaganda, Anti-China, Economy, Early Detection, Social Conflict.

A. PENDAHULUAN

Sejak berabad-abad silam, masyarakat Tionghoa sudah mendarat di Nusantara, sebelum datangnya pada penjajah Eropa dan para pendatang dari wilayah Arab. Sebagian dari mereka menikah dengan penduduk Nusantara. Mereka juga turut mewarnai budaya dan tradisi lokal di Nusantara. Khususnya di Jawa telah terbentuknya Sino-Javanese Muslim culture yang dari Banten sampai dengan Surabaya dikarenakan adanya keikutsertaan Muslim Tionghoa terkait penyebaran agama Islam. Dapat dinilai bahwa masyarakat pendatang Tionghoa juga berperan dalam pembentukan beberapa tradisi dan budaya di Indonesia diantaranya system pelayaran, pengobatan, obat-obatan, kesenian, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Walaupun masyarakat pendatang Tionghoa sudah lama hidup berdampiang di tengah budaya Nusantara, tetapi keberadaannya dapat diterima sepenuhnya oleh sebagian masyarakat (al Qurtuby, 2017).

Tiongkok dan Indonesia menjalin hubungan diplomatik formal sejak tahun 1950, kemudian hubungan diplomatik semakin meningkat ditandai dengan hadirnya Perdana Menteri Tiongkok Zhou En Lai pada Konferensi Asia Afrika (KAA) tanggal 18-25 April 1955 di Bandung (Utami, 2015). Pasca Indonesia menarik diri dari PBB pada Januari 1965, Presiden Soekarno membentuk CONEFO (Conference of The New Emerging Forces) atas dukungan dari negara Tiongkok. Kemudian pasca tragedi G30S pada 30 September 1965, adanya pergantian Presiden dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto lalu adanya pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Tiongkok atas tuduhan bahwa Tiongkok berperan dalam peristiwa G30S (Granieri, 2018). Kemudian hubungan RI dengan Tiongkok mulai membaik pada akhir tahun 1980-an, setelah adanya pembahasan normalisasi hubungan diplomasi dalam pertemuan Presiden Soeharto dengan Qian Qichen (Menteri Luar Negeri Tiongkok) pada tahun 1989. Kemudian Ali Alatas (Menteri Luar Negeri RI) berkunjung ke Tiongkok pada bulan Juli 1990 untuk membentuk kesepakatan hubungan diplomatik antara kedua negara (Liu, 2015).

Menurut Dubes RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun bahwa hubungan perdagangan Indonesia-Tiongkok saat ini dalam kondisi yang sangat erat, hal ini dapat dinilai dari data publikasi Bea Cukai Tiongkok bahwa total nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok per Oktober 2022 adalah US\$ 122,47 miliar atau meningkat sekitar 26,29 persen dari tahun sebelumnya, sehingga diyakini masih banyak peluang untuk meningkatkan kerjasama yang signifikan di berbagai bidang. Selain itu, KBRI Beijing pada 2022 telah meluncurkan aplikasi belanja online (mobile apps) yang memamerkan produk-produk berkualitas dari Indonesia untuk kalangan bisnis dan konsumen di Tiongkok dengan nama KOMODODO sebagai bentuk pengembangan platform e-commerce idnstore atau Indonesia Store (KBRI Tiongkok, 2022).

Berdasarkan data BPS bahwa Tiongkok merupakan negara mitra perdagangan Indonesia terbesar, ditinjau dari neraca perdagangan ekspor-impor (dalam satuan juta USD) antara Indonesia-Tiongkok jika dibandingkan dengan Indonesia- Amerika Serikat pada periode tahun 2018 s.d. 2022. Pada tahun 2018 senilai 72.670; lalu meningkat tahun 2019 menjadi 72.892,5; lalu sedikit menurun di tahun 2020 menjadi 71.416,5; lalu meningkat kembali tahun 2021 menjadi 110.009,1 dan tahun 2022 senilai 133.561,9. Sedangkan nilai perdagangan Indonesia-Amerika Serikat mengalami fluktuatif sejak 2018 s.d. 2022 namun tetap dibawah Tiongkok, yaitu tahun 2018 senilai 28.615,2; menurun di tahun 2019 menjadi 27.106,2; lalu sedikit meningkat di tahun 2020 menjadi 27.202,7; lalu meningkat tahun 2021 menjadi 37.023,4 dan tahun 2022 senilai 39.797,4 (BPS RI, 2023).

Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini terus meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok, termasuk penandatanganan dokumen kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok pada 16 November 2022 di Bali. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, untuk menyaksikan penandatanganan lima dokumen kerja sama yang disepakati kedua negara

pada tahun 2008, yakni rencana aksi bersama untuk mempromosikan kerja sama di bawah Poros Maritim Global dan Belt and Road Initiative; Memorandum of Understanding (MoU) Pengembangan Bersama Pusat Perlindungan, Penelitian dan Inovasi Tanaman Obat antara Indonesia dan Tiongkok; Nota Kesepahaman tentang Pelatihan Vokasi Industri; nota kesepahaman untuk meningkatkan kerja sama ekonomi digital; dan kesepakatan mengenai perluasan dan pendalaman kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral. (Humas Sekretariat Kabinet RI, 2022).

Di bidang bisnis, juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama e-commerce antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok pada pertemuan tersebut. Nota kesepahaman ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman sebelumnya di bidang ekonomi digital yang keduanya telah ditandatangani pada KTT G20 di Bali pada November 2022. Selain itu, di bidang infrastruktur, proyek pembangunan kereta api cepat (KCIC) dan kerjasama pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibuka dan dioperasikan. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok bersama-sama mendorong implementasi konkrit untuk menjalin kerja sama baru antara Otoritas IKN dan Shenzhen dalam pembangunan perkotaan (Praditya, 2023).

Namun demikian ditengah meningkatnya kerjasama ekonomi Indonesia- Tiongkok, propaganda anti Tiongkok teridentifikasi masih ada di Indonesia. Ada pula yang terang-terangan mengungkapkan perasaan tersebut baik di muka umum maupun di dunia maya seperti media sosial. Ada pula yang mendekonstruksinya secara terselubung dan sembunyi-sembunyi, misalnya dengan menggunakan bahasa simbolik tertentu atau menggossipkan kata “aseng”, istilah sarkastik yang menghina sentimen anti-Tionghoa. Bukti bahwa anti-Tionggok masih belum hilang adalah betapa mudahnya melakukan provokasi, menggiring dan menghasut masyarakat bawah untuk melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap warga negara Tiongkok yang dilakukan oleh kelompok dan individu dengan berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Rasisme dan kekerasan anti-Tionghoa seringkali didorong oleh perbedaan sosial ekonomi, persaingan politik atau persaingan bisnis, seperti yang terjadi di beberapa tempat yaitu Medan, Solo dan kota-kota lainnya (Qurtuby, 2017).

Lembaga Survei Indostrategic melakukan survei nasional tentang program pemerintah yaitu pembangunan jalan tol, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Kereta Cepat (KCIC) Jakarta-Bandung. Hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat bereaksi negatif terhadap perpindahan ke ibu kota, sehingga 8,1% sangat setuju dan 32% sangat setuju. Sementara itu, sebanyak 30,1% menyatakan setuju dan 27,2% sangat setuju mengenai pemindahan ibu kota negara. Untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC), 73,5% responden percaya atau yakin bahwa pembangunan akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pada saat yang sama, 18,8 persen responden meyakini perekonomian akan membaik. Diperkirakan hal ini dipengaruhi oleh propaganda anti-Tionggok yang masih marak di masyarakat (Suryana, 2023).

Di sisi lain, upaya Presiden RI Joko Widodo menawarkan lahan kepada investor Tiongkok untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ramai menjadi gunjingan masyarakat. Diantaranya, Jerry Massie (pengamat kebijakan publik dan direktur penelitian politik dan kebijakan publik/P3S) berpendapat bahwa upaya Presiden Indonesia Joko Widodo menawarkan IKN kepada pengusaha Tiongkok dapat mengancam kedaulatan negara karena kemungkinan penguasaan IKN secara sepihak. tanah investor Tiongkok. Padahal lahan IKN di Kaltim adalah milik negara. (Satryo, 2023).

Kemudian Suryadinata yang merupakan peneliti senior dari ISEAS - Yusof Ishak Institute menyatakan bahwa pada tahun 2021 saat Pemerintah Indonesia sedang melakukan penanganan pandemi Covid-19, adanya penyebaran video-video anti-pemerintah dan anti-Tionggok di media sosial yang mengkritik kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi dan menyerukan agar Presiden RI Joko Widodo mundur. Suryadinata menilai bahwa Politik identitas di Indonesia masih kuat karena merupakan senjata paling berguna yang dimiliki pihak

oposisi dalam melawan pemerintah (Suryadinata, 20021).

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu akan meneliti dan mengkaji propaganda anti Tiongkok dalam prefektif Intelijen guna mengetahui implikasinya terhadap kerjasama ekonomi Indonesia- Tiongkok. Kemudian dirumuskan deteksi dini dalam rangkaantisipasi terhadap ancaman konflik sosial dan mengamankan kebijakan kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok, sebagai salah satu peran intelijen sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Propaganda

Menurut Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell, propaganda adalah suatu bentuk komunikasi yang dirancang untuk memperoleh tanggapan sesuai dengan niat yang diinginkan pelaku propaganda. Persuasi bersifat interaktif dan berupaya memuaskan kebutuhan baik yang membujuk maupun yang dibujuk. Model propaganda menggambarkan bagaimana unsur komunikasi informatif dan persuasif dapat dimasukkan dalam komunikasi propaganda, yang memisahkan propaganda ke dalam kategori komunikasi tertentu (Jowett & O'Donnell, 2012). Menurut Jacques Ellul Propaganda adalah komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisir untuk menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam kegiatan massa yang secara psikologis terhubung dan menjadi bagian dari suatu kelompok atau organisasi (Ellul, 1973).

Kemudian konsep propaganda menurut Harold Lasswell bahwa Propaganda adalah pengaturan perilaku kolektif melalui manipulasi simbol-simbol penting. Penggunaan istilah perilaku kolektif merupakan upaya untuk menangkap suatu pendapat umum, suatu sistem nilai-nilai bersama tanpa melihat kedekatan fisik. Dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna, Lasswell berupaya menangkap rangsangan yang kemudian menimbulkan respons. Lasswell kemudian memberikan penjelasan lain tentang cara kerja propaganda di masyarakat yang terjadi kekacauan sosial akibat perubahan teknologi yang sangat pesat. Selain itu, menurut Lasswell, tujuan Propaganda adalah untuk menyebarkan kebencian terhadap musuh; untuk menjaga persahabatan sekutu; menjaga persahabatan dan bila memungkinkan bekerja sama dengan pihak netral; dan menindas semangat musuh (American et al., 2008).

Terdapat tujuh teknik propaganda yang umum digunakan, yaitu:

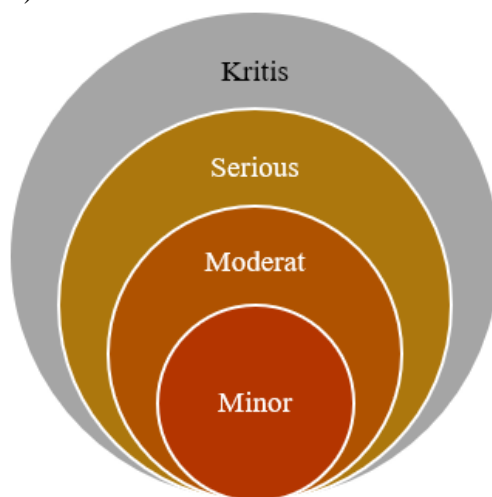
- a. *Name Calling*, yaitu memberikan julukan negatif terhadap suatu gagasan, individu, objek, atau tujuan tertentu dengan tujuan membuat orang menolaknya tanpa terlebih dahulu memverifikasi kebenarannya. Contohnya, menuduh lawan politik sebagai seorang kriminal.
- b. *Glittering Generalities*, yakni penggunaan kata-kata positif untuk menggambarkan sesuatu agar mendapatkan dukungan tanpa memastikan kebenaran asosiasi tersebut. Sebagai contoh, Amerika Serikat pernah menyebut operasi militernya di Afghanistan sebagai "Operasi Keadilan Tak Terhingga" dengan misi "Hukum Tanpa Batas", atau ketika merencanakan serangan ke Irak, mereka menyebutnya sebagai misi kemanusiaan untuk membebaskan rakyat dari ancaman senjata pemusnah massal.
- c. *Transfer*, yaitu menghubungkan suatu tujuan dengan simbol yang memiliki otoritas. Contohnya, slogan politik seperti "Pilih Kembali Mega di Pemilu 2004" yang mengaitkan nama tokoh dengan pemilihan umum.
- d. *Testimonial*, yaitu menggunakan pernyataan dari tokoh yang dihormati atau dibenci untuk mendukung atau meremehkan suatu tujuan. Teknik ini sering dijumpai dalam bentuk dukungan politik oleh media massa, figur publik, atau tokoh terkenal.
- e. *Plain Folks*, yakni pendekatan yang menampilkan pembicara sebagai bagian dari masyarakat biasa untuk menciptakan kesan kebersamaan. Contohnya, seorang politisi yang berkata, "Saya adalah salah satu dari Anda, hanya rakyat biasa".

- f. *Card Stacking*, yaitu memilih secara selektif informasi yang benar atau salah, logis atau tidak logis, untuk membangun argumen tertentu. Misalnya, pernyataan seperti "Pembunuhan terhadap pemimpin kita benar-benar merupakan penghinaan terhadap partai kita" yang disusun untuk membangkitkan emosi massa.
- g. *Bandwagon*, yakni upaya meyakinkan masyarakat bahwa suatu gagasan atau gerakan memiliki dukungan luas sehingga setiap orang terdorong untuk ikut serta. Prinsip ini semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media massa. Misalnya, pada masa Orde Baru, pemerintah secara berkelanjutan memanfaatkan TVRI sebagai alat propaganda negara dengan mengusung narasi "pembangunan", yang dalam jangka panjang berhasil mengonsolidasikan kontrol terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat.

2. Teori Ancaman

Berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman adalah setiap usaha, pekerjaan, kegiatan dan kegiatan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau terbukti mengancam keselamatan, keamanan, kedaulatan, dan keutuhan bangsa dan kepentingan nasional dalam berbagai bidang antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, 2011). Ada tiga aspek yang berpengaruh dalam penilaian suatu ancaman, yaitu pertama, penilaian terhadap kemampuan mereka (*capabilities*), intensitasnya (*intentions*), dan seberapa mudah mereka diserang (*vulnerability*) (Collins, 1994).

Menurut Sukarno (2014) ada dua bentuk ancaman yaitu ancaman yang terlihat dan ancaman yang terlihat. Ancaman yang terlihat, yaitu ancaman yang bersifat konvensional atau fisik. Contohnya adalah invasi musuh, sengketa pulau, pelanggaran wilayah, konflik teritorial-perbatasan, terorisme, provokator, anarki, konflik sosial, konflik SARA, pemberontakan bersenjata, dan lain-lain. Kemudian ancaman terlihat adalah ancaman yang bersifat non-konvensional atau non-fisik, seperti konspirasi politik, kejahatan melalui komputer, separatisme, disintegrasi, propaganda, sabotase, spionase, subversi, krisis kepercayaan, dan lain-lain (Bahtiar et al., 2021).



Sumber: Sugiman (2009)

3. Tingkatan Ancaman Menurut Robert Ring

Menurut Robert Ring, ancaman memiliki beberapa tingkatan dalam menilai permasalahannya. Ancaman tersebut terdiri dari tingkat minor, moderat, serius, dan kritis. Pertama, tingkatan minor, yaitu ancaman dalam sembilan komponen intelijen strategis

terhadap suatu daerah yang dampaknya tergolong kecil, contohnya perusakan kantor pemerintahan. Kedua, tingkatan moderat, yaitu ancaman dalam sembilan komponen intelijen strategis suatu daerah yang dampaknya tergolong sedang, contohnya ATHG terhadap kelangsungan pembangunan daerah. Ketiga, tingkatan serius, yaitu ancaman dalam sembilan komponen intelijen strategis suatu negara yang berdampak besar, contohnya separatisme, terorisme, intervensi asing, dan diskriminasi SARA. Keempat, tingkatan kritis, yaitu ancaman dalam sembilan komponen intelijen strategis suatu negara yang berdampak sangat besar, contohnya invasi negara lain, pemberontakan massal (agresi) (Sugirman, 2009).

Ancaman merupakan upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan membahayakan pihak lain (Prunckun, 2019). Sasaran ancaman dapat mencakup individu, organisasi, maupun negara. Prunckun (2019) menjelaskan bahwa dalam menganalisis ancaman, terdapat dua elemen utama yang perlu diperhatikan, yaitu *threat intent* dan *threat capability*. *Threat intent* mengacu pada keyakinan agen ancaman terhadap kemungkinan keberhasilan serangan yang mereka lakukan. Elemen dalam *threat intent* terdiri dari *desire* (keinginan) dan *expectation* (harapan). Keinginan merujuk pada tingkat motivasi pelaku untuk menimbulkan kerusakan atau kegagalan, sedangkan harapan berkaitan dengan keyakinan pelaku bahwa tujuan mereka akan tercapai apabila rencana serangan dijalankan dengan baik. Sementara itu, *threat capability* menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh agen ancaman dalam melaksanakan serangan terhadap targetnya. Elemen dalam *threat capability* meliputi *knowledge* (pengetahuan) dan *resource* (sumber daya). Pengetahuan merujuk pada informasi yang dikuasai oleh pelaku dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan serangan, sedangkan sumber daya mencakup keterampilan, pengalaman, serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana mereka.

4. Teori Deteksi Dini

Berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, deteksi dini adalah bagian dari tujuan Intelijen Negara, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 yaitu Tujuan intelijen nasional adalah menemukan, mengidentifikasi, mengevaluasi, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi intelijen untuk memberikan peringatan dini guna mengantisipasi berbagai bentuk dan sifat ancaman potensial dan aktual terhadap keamanan dan eksistensi negara dan bangsa. peluang untuk menjamin kepentingan dan keamanan nasional (Undang-Undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, 2011). Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), deteksi adalah upaya menemukan atau menelusuri suatu keberadaan atau kenyataan (kbbi.web.id, 2023). Dalam hal ini deteksi dini merupakan upaya untuk menemukan atau mengamati keberadaan ATHG sedini mungkin.

Deteksi dini adalah upaya atau kegiatan untuk mencari dan menemukan hal, peristiwa atau situasi tertentu yang mungkin atau mungkin merupakan gejala atau awal dari suatu ancaman/kekhawatiran, sehingga pengelola keamanan dapat mempersiapkan dan mengerahkan kekuatan dan kemampuannya untuk tindakan preventif sehingga ancaman/gangguan terjadi, serta pengolahan atau pelaksanaan tindakan jika terjadi ancaman/gangguan (Yudhana, 2009).

Deteksi dini juga berkaitan dengan pencegahan, yang mana pencegahan dalam lingkup lokal atau lingkungan sekitar merupakan upaya paling efektif melawan ancaman. Dalam melakukan deteksi dini, diperlukan jaringan yang luas dari berbagai bidang terkait (multidisiplin) seperti kalangan profesional, komunitas sosial dan keamanan untuk mengidentifikasi kapan seseorang melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan supremasi hukum (Weert, 2020).

5. Teori Konflik Sosial

Secara linguistik, konflik berasal dari bahasa latin yaitu “*con*” yang berarti dan “*fligere*” yang berarti berbenturan. Kemudian Lewis Coser dalam bukunya. “*The Functions of Social*

Conflict” mendefinisikan konflik sosial sebagai perebutan nilai-nilai dan pesaing menetralkan atau menekan atau menghilangkan sumber-sumber pengakuan status, kekuasaan, dan konflik yang langka. Lebih lanjut, konflik hanya dipahami dari segi nilai, diskriminasi, dan sikap menindas terhadap pihak yang lebih lemah (*prolifer*). Namun, Coser juga melihat konflik tersebut terkait dengan pembatasan realisasi diri. Arti lain dari konflik sosial adalah konflik antar anggota masyarakat yang terjadi dimana-mana dalam kehidupan. Kemudian suatu komunikasi atau proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyalahkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau se nya membuatnya berdaya. Selain itu, konflik sosial juga dapat dipandang sebagai salah satu bentuk konflik antar anggota atau masyarakat, yaitu suatu proses pencapaian tujuan hidup secara menyeluruh dengan cara merendahkan pihak lain, mengabaikan norma dan nilai yang ada (Alwi, 2016).

Kemudian teori konflik Ralf Dahrendorf menjelaskan konflik dalam sebuah paradigma bahwa Konflik dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik antar peran sosial atau biasa disebut konflik peran. Konflik peran adalah situasi di mana orang dihadapkan pada ekspektasi yang bertentangan terhadap peran mereka yang berbeda.
- b. Konflik antar kelompok sosial.
- c. Konflik antara kelompok yang terorganisir dan terorganisir.
- d. Konflik antar entitas nasional, misalnya antar partai politik, antar negara atau organisasi internasional.

Teori konflik Dahrendorf sering disebut sebagai teori konflik dialektis. Karena menurut Dahrendorf masyarakat mempunyai dua wajah yaitu konflik dan konsensus, maka mungkin suatu masyarakat mengalami konflik jika sebelumnya ada, dan sebaliknya konflik dapat berujung pada konsensus. Teori Dahrendorf mengkritisi asumsi-asumsi teori struktural-fungsional melalui analisis Marxis. Pada intinya Teori konflik Dahrendorf menyatakan konsep perubahan struktural masyarakat terjadi karena adanya ototitas, dan dalam masyarakat post kapitalis telah terjadi heterogenitas kelas sosial.

Dahrendorf mengklasifikasikan kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik ke dalam beberapa kategori. Kelompok semu terdiri dari individu-individu yang memiliki kekuasaan dan kepentingan yang serupa, yang muncul sebagai akibat dari terbentuknya kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas, di mana anggotanya memiliki keinginan untuk mengubah tatanan kekuasaan yang ada. Kelompok ini memiliki struktur yang terorganisir, dengan program dan tujuan yang jelas. Dalam masyarakat, kelompok kepentingan sering kali menjadi pemicu konflik nyata dan memainkan peran penting dalam memahami dinamika konflik sosial. Kelompok konflik, di sisi lain, adalah kelompok yang secara aktif terlibat dalam konflik dan terbentuk dari berbagai kelompok yang lebih kecil.

Dahrendorf juga menjelaskan bahwa ketika kelompok konflik muncul, mereka dapat memicu perubahan dalam struktur sosial. Semakin dalam konflik yang terjadi, semakin besar kemungkinan terjadinya perubahan yang bersifat radikal. Jika konflik berlangsung dengan intensitas tinggi dan disertai dengan kekerasan, perubahan struktural dapat terjadi secara tak terduga. Menurut Dahrendorf, kelompok-kelompok ini merupakan bagian dari struktur sekunder dalam suatu sistem sosial (Dahrendorf, 1959).

C. METODE

Penelitian saat ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam. Metode penelitian Kualitatif adalah metode yang menggambarkan pemahaman dan pemaknaan berbagai individu atau kelompok terhadap isu-isu sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan

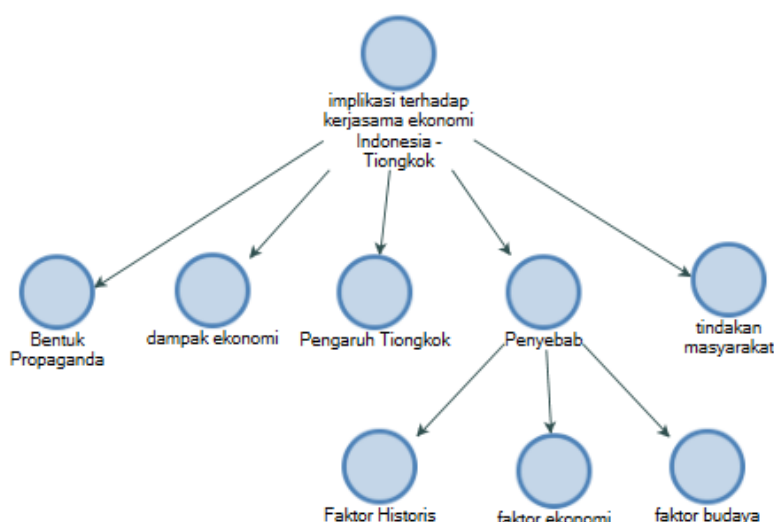
informasi dari partisipan tertentu, dari topik khusus ke topik umum yang dianalisis secara induktif, dan menafsirkan makna informasi tersebut. Makalah penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel dalam laporan akhir. Partisipan dalam penelitian ini hendaknya menerapkan perspektif induktif (Creswell & David, 2018). Desain penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis ancaman propaganda anti Tiongkok terhadap kebijakan kerjasama ekonomi Internasional Indonesia dengan Tiongkok.

Data primer pada penelitian ini bersumber dari wawancara langsung dan mendalam terhadap narasumber yang telah ditetapkan. Data sekunder bersumber dari informasi diperoleh dari teknik pengumpulan data yang mendukung informasi dasar, diantaranya studi pustaka dari buku, jurnal, literatur dan data dari lembaga terkait. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu proses tanya jawab secara langsung, dengan sumber yang diidentifikasi melalui pedoman wawancara yang disusun dan disertai pengembangan pertanyaan. Narasumber yang dipilih pada penelitian ditetapkan berdasarkan kriteria yang mendukung perolehan informasi secara obyektif serta keterwakilan dalam menganalisa masalah propaganda anti Tiongkok dan Kerjasama internasional antara Indonesia dan Tiongkok. Narasumber dalam penelitian ini juga ditetapkan berdasarkan kriteria dan keterwakilan dari stakeholders yang berkaitan dengan penelitian, Pemilihan narasumber atau informan fokus pada penyajian permasalahan yang diselidiki. Berdasarkan kriteria yang ada maka penelitian ini kriteria pejabat publik yang dipilih sebagai narasumber memiliki kompetensi dan pengetahuan tentang masalah propaganda anti Tiongkok dan kerja sama Internasional antara Indonesia dengan Tiongkok.

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini juga difasilitasi dengan analisis data NVivo menggunakan software NVivo 12, analisis fishbone dan analisis intelijen terdiri dari *Judgement, Early Warning, Problem Solving, dan Forecasting*. Fishbone dapat digunakan untuk rencana pengumpulan data intelijen (intelligence collections), dalam rangka deteksi dan peringatan dini (Prunckun, 2010).

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Propaganda Anti Tiongkok Terhadap Kerjasama Ekonomi Indonesia-Tiongkok



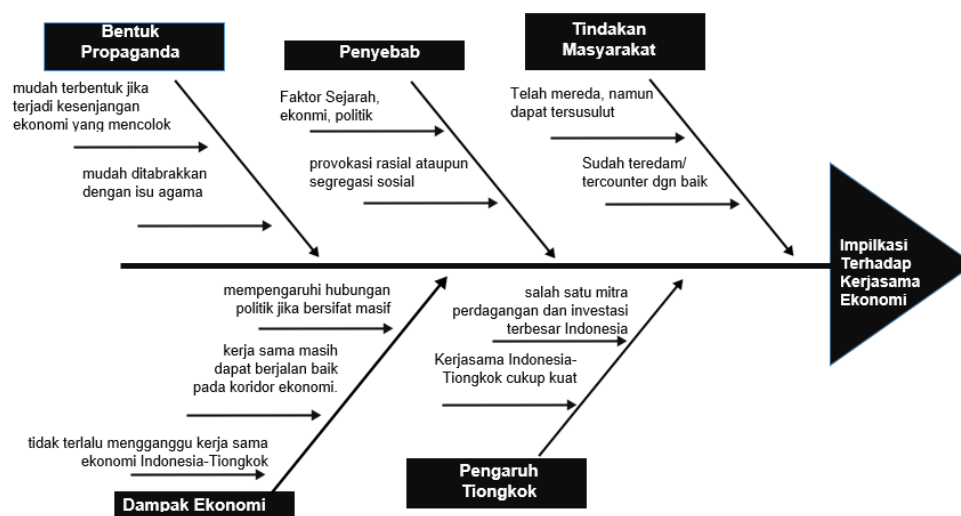
Sumber: Olah Data Peneliti Menggunakan NVivo (2024)

Sentiment anti China di Indonesia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor Sejarah, ekonomi dan kepentingan politik. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu bahwa Perasaan terhadap keturunan Tionghoa berakar pada kolonialisme Belanda yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu (Pertiwi, 2021). Berdasarkan teori

rasisme menurut Benjamin P. Bowser bahwa rasisme dapat terjadi pada 3 level, yaitu kultural, institusional, dan individual (Bowser, 2017). sentiment anti Tiongkok di Indonesia masih bersifat individual dan kultural yang dilatar belakangi oleh faktor historis, ekonomi dan politik. Terkait kepentingan politik, isu anti Tiongkok hanya disuarakan untuk kepentingan sesaat pada masa pemilu. Diperkirakan hal ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari kelompok konservatif. Hal ini sesuai dengan teori propaganda Harold Lasswell yang menyatakan bahwa propaganda adalah pengaturan perilaku kolektif melalui manipulasi simbol-simbol penting. Dalam hal ini, setiap masa Pemilu di Indonesia setiap kalangan kerap menggunakan simbol-simbol tertentu untuk memanipulasi perilaku kolektif masyarakat. Kemudian sebagaimana masyarakat juga masih menggunakan isu-isu kebencian untuk memancing emosi orang lain, diantaranya isu sentiment anti Tiongkok. Selain itu, hal ini juga dapat dijelaskan sebagai kelompok kepentingan menurut yang ada dalam teori konflik Dahrendorf, bahwa kelompok kepentingan muncul, untuk memicu perubahan dalam struktur sosial. Pada situasi terkini dinyatakan bahwa pengaruh ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia dinilai kuat dan merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia.

Dari sisi negara Tiongkok sendiri memiliki ambisi untuk menguasai ekonomi dunia dan bersaing dengan kekuatan ekonomi dunia lainnya. Oleh karena itu, pada pemerintahan Xi Jinping saat ini, Tiongkok menggunakan soft power ke berbagai negara untuk melebarkan sayap pengaruh ekonominya, termasuk ke Indonesia. Hal ini juga menyebabkan beberapa negara lain bergantung kepada Tiongkok secara ekonomi. Namun demikian, beberapa narasumber menilai bahwa saat ini sentiment anti Tiongkok telah mereda jika dibandingkan dengan situasi pada 1998. Walaupun isu tersebut dinilai masih mudah disulut ditengah masyarakat Indonesia. Selain itu, pada berita-berita di media baik media sosial, media cetak maupu media massa hanya berpengaruh menyulut sentiment anti Tiongkok namun memicu pergerakan atau tindakan-tindakan anarkis.

Saat ini sentiment dan propaganda anti Tiongkok signifikan berpengaruh terhadap kebijakan kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok, walaupun pihak Pemerintah Tiongkok pernah menyatakan keberatan atas adanya propaganda tersebut di Indonesia. Selain itu, alasan terpengaruhnya kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok karena dalam kerja sama ekonomi, Tiongkok dinilai lebih memberi kemudahan dibanding negara maju lainnya. Kemudian beberapa narasumber juga menilai bahwa propaganda anti-Tiongkok dapat mempengaruhi hubungan politik kedua negara, jika sentimen ini bersifat massif. Namun demikian pemerintah bersama aparat terkait masih bisa meredam isu tersebut, maka kerja sama Indonesia-Tiongkok masih dapat berjalan baik dalam koridor kerjasama ekonomi.

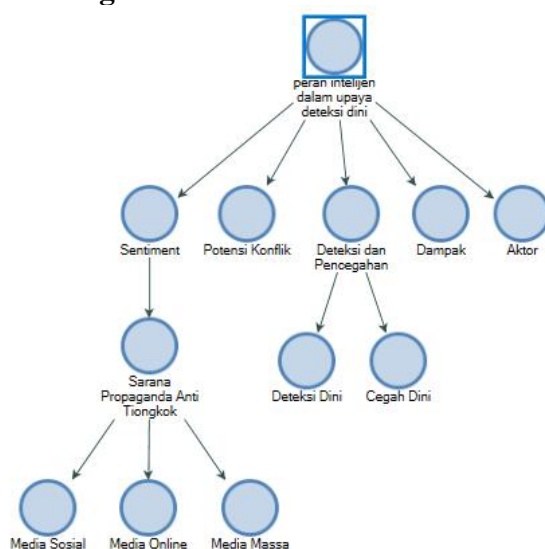


Sumber: Olah Data Peneliti (2024)

Diagram tersebut menggambarkan hubungan antara bentuk propaganda, penyebabnya, tindakan masyarakat, dampak ekonomi, pengaruh Tiongkok, dan implikasi terhadap kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok. Bentuk propaganda mudah terbentuk jika terjadi kesenjangan ekonomi yang mencolok dan dapat digabungkan dengan isu agama. Propaganda ini memiliki penyebab seperti faktor sejarah, ekonomi, politik, provokasi rasial, atau segregasi sosial. Propaganda tersebut dapat memicu tindakan masyarakat, yang meskipun saat ini telah mereda dan dapat terkendali dengan baik, tetap memiliki potensi untuk tersulut kembali jika tidak dikelola dengan tepat. Dari segi dampak ekonomi, propaganda ini dapat memengaruhi hubungan politik, terutama jika bersifat masif. Namun, selama isu ini tetap berada pada koridor ekonomi yang sehat, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok tidak terlalu terganggu.

Pada aspek pengaruh Tiongkok, negara tersebut merupakan salah satu mitra perdagangan dan investasi terbesar Indonesia. Hubungan ini cukup kuat dan memberikan fondasi untuk keberlanjutan kerja sama. Akhirnya, seluruh proses ini memiliki implikasi terhadap kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok, di mana stabilitas sosial dan ekonomi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

2. Peran Intelijen Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Ancaman Propaganda Anti Tiongkok Guna Mencegah Potensi Konflik Sosial di Masyarakat



Sumber: Olah Data Peneliti Menggunakan NVivo (2024)

Guna mendeteksi secara dini potensi konflik yang timbul akibat sentimen anti-Tionghoa di Indonesia, langkah awal perlu dilakukan pendalaman terkait isu atau bentuk propaganda yang berkembang termasuk actor, media dan sasaran dari propaganda tersebut. Salah satu narasumber menyatakan bahwa sentiment anti Tiongkok yang dimaksud meliputi perasaan negatif atau kebencian terhadap individu, produk, atau kebijakan yang berasal dari Tiongkok, dan dapat menjadi sumber potensi konflik di Indonesia karena memicu diskriminasi, kekerasan, atau propaganda politik. Kondisi saat ini sentiment anti Tiongkok telah cenderung menurun, namun masih adanya potensi muncul jika digerakan oleh kelompok kepentingan terutama kaitannya dengan agenda penolakan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terkait kerjasama dengan Pemerintah Tiongkok.

Disisi lain, peran media sebagai sarana propaganda juga dinilai penting dalam penyebaran sentiment anti Tiongkok di Indonesia. Media sangat diperlukan untuk membentuk persepsi public baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan teori propaganda Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell bahwa model propaganda menggambarkan bagaimana komunikasi propaganda dapat mencakup unsur komunikasi informatif dan persuasif, yang

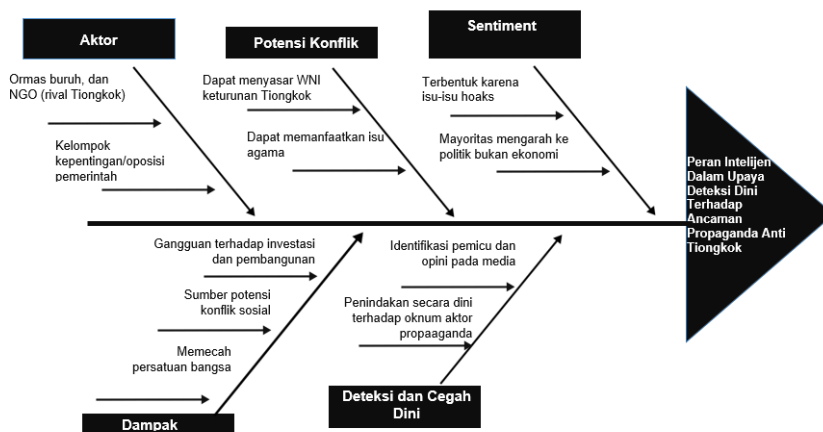
memisahkan propaganda ke dalam kategori komunikasi tertentu (Jowett S. & O'Donnel, 2012). Pada era ini media sosial dinilai efektif karena didalamnya memungkinkan untuk melakukan interaksi secara langsung, misalnya Ketika terdapat suatu postingan gambar atau tulisan yang disebar dalam media sosial, maka para pengguna lain dapat langsung mengamplifikasi, menyebarkan dan mengomentarnya. Hal ini diperkirakan dapat lebih cepat membentuk persepsi seseorang.

Sentiment anti Tiongkok juga bisa terjadi akibat adanya persaingan geopolitik terutama di Laut China Selatan (LCS). Hal ini juga memungkinkan diciptakan oleh pihak-pihak atau rival dari Tiongkok. walaupun saat ini potensi konflik sosial akibat sentiment anti Tiongkok dinilai kecil atau sebagai potensi gangguan, namun potensi tersebut jika didiamka atau discounter maka dapat menjadi ambang gangguan dan menjadi gangguan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan terhadap potensi tersebut dalam pencegahan potensi ancaman.

Saran tindak terkait deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik sosial akibat sentiment anti Tiongkok, diperlukan penggalian informasi dan strategi melalui bidang siber karena pada saat ini propaganda kerap disebar luaskan melalui media sosial. Selain itu, perlu dalam mencegah konflik juga dapat menggunakan operasi penggalan berdasarkan data awal hasil penyelidikan. Berdasarkan teori penggalan merupakan upaya mempengaruhi sasaran agar dapat menguntungkan pihak penggalan. Sasaran dari penggalan dapat ditujukan terhadap para tokoh atau actor yang menyuarakan sentiment anti Tiongkok di media. Namun jika para tokoh tersebut dapat digalang dapat dilakukan operasi kontra atau penegakan hukum bagi yang bersangkutan.

Kemudian dalam rangka pencegahan, pemerintah perlu melakukan beberapa tindakan diantaranya meningkatkan nilai-nilai toleransi, plurarisme dan demokrasi disertai dengan pemberantasan propaganda anti Tiongkok. Disamping itu, pihak Dewan Pers atau stakeholder pers/jurnalis untuk memberikan pemahaman komprehensif dalam penulisan berita, dengan melakukan teknik calling and labelling dalam mengabarkan sebuah peristiwa terutama yang bermuatan sentiment anti Tiongkok atau mendiskreditkan WNI keturunan Tionghoa.

Kemudian Kementerian Komdigi RI perlu didorong untuk memperkuat konten-konten yang bermuatan semangat kebangsaan dan khbinekaan. Selain itu, Kementerian Komdigi RI juga berwenang melakukan klarifikasi terkait hoaks dan disinformasi yang beredar di dunia maya. Disamping itu, perlu juga mendorong komunitas Tionghoa untuk mengkampanyekan bahwa mereka juga terlibat dan mendukung peristiwa kemerdekaan Indonesia, serta menghindari sikap eksklusivisme di lingkungan masyarakat. Guna memperkuat upaya pencegahan konflik sosial akibat sentiment anti Tiongkok, perlu adanya dukungan edukasi, sosialisasi dan literasi dari lembaga-lembaga masyarakat terkait penghapusan diskriminasi etnis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga dapat memanfaatkan tokoh agama, tokoh adat, LSM atau volentir di tengah masyarakat.



Sumber: Olah Data Peneliti (2024)

Diagram tersebut menjelaskan peran intelijen dalam mendeteksi dan mencegah propaganda anti-Tiongkok dengan melihat hubungan antara aktor, potensi konflik, sentimen, dampak, serta deteksi dan pencegahan dini. Aktor utama yang terlibat meliputi organisasi buruh, NGO yang bersaing dengan Tiongkok, serta kelompok kepentingan atau oposisi pemerintah. Aktor-aktor ini dapat memanfaatkan isu tertentu untuk memicu konflik. Potensi konflik yang muncul mencakup sasaran terhadap WNI keturunan Tiongkok dan pemanfaatan isu agama. Hal ini memperbesar peluang terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu investasi dan pembangunan, serta berisiko memecah persatuan bangsa. Sentimen terhadap propaganda ini sering terbentuk akibat isu-isu hoaks. Sentimen yang berkembang biasanya lebih banyak mengarah ke ranah politik dibandingkan dengan ekonomi, menunjukkan bahwa motivasi utama seringkali bersifat ideologis. Dampak dari propaganda ini bisa sangat merugikan, mulai dari gangguan terhadap investasi hingga ancaman pada stabilitas sosial. Oleh karena itu, deteksi dan pencegahan dini menjadi langkah strategis. Hal ini melibatkan identifikasi pemicu dan opini di media serta tindakan langsung terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam penyebaran propaganda. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memperkuat peran intelijen dalam upaya mendeteksi dan mencegah ancaman propaganda anti-Tiongkok, sehingga stabilitas sosial dan kerja sama ekonomi dapat tetap terjaga.

3. Analisis Intelijen

Analisis intelijen dalam penelitian ini mencakup empat aspek utama, yaitu judgment mengidentifikasi dua permasalahan utama terkait propaganda anti-Tiongkok, dampaknya terhadap kerja sama ekonomi Indonesia-Tiongkok dan deteksi dini ancaman konflik sosial. Meskipun sentimen anti-Tiongkok telah mereda dibandingkan 1998, isu ini masih mudah memanaskan melalui media sosial, media cetak, maupun media massa. Di sisi lain, Tiongkok, sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, terus memperluas pengaruh ekonominya secara global melalui pendekatan soft power.

Early warning menyoroti pentingnya antisipasi terhadap dampak dan risiko di masa depan. Propaganda anti-Tiongkok yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu seperti aktor politik, organisasi buruh, atau NGO, berpotensi memengaruhi hubungan politik kedua negara. Selain itu, fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk proxy war oleh negara-negara rival Tiongkok, seperti Amerika Serikat. Meskipun intensitas sentimen anti-Tiongkok saat ini rendah, tetap diperlukan upaya antisipasi untuk mencegah konflik sosial yang lebih besar.

Problem solving menawarkan berbagai tindakan strategis, seperti meningkatkan sosialisasi nilai toleransi dan pluralisme, mengedukasi media untuk memberitakan secara netral, dan memberantas propaganda serta hoaks. Kementerian Komdigi RI diharapkan aktif meredam disinformasi dan memperkuat konten positif terkait semangat kebangsaan. Selain itu, komunitas intelijen, termasuk Intelijen Siber, dapat memainkan peran kunci dalam memonitor dan mereduksi propaganda yang provokatif.

Forecasting mengantisipasi munculnya kembali propaganda anti-Tiongkok, terutama pada tahun-tahun politik seperti pemilu, ketika isu ini sering dimanfaatkan untuk menggagalkan dukungan kelompok konservatif. Faktor sejarah, ekonomi, dan politik menjadi latar belakang utama sentimen ini. Dalam jangka panjang, potensi konflik dapat meningkat apabila kesenjangan ekonomi tidak diatasi, sementara media sosial terus menjadi alat utama untuk menyebarkan sentimen negatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kontra-propaganda yang mampu membentuk persepsi publik untuk menolak diskriminasi etnis.

E. KESIMPULAN

Pengaruh ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia dinilai kuat dan merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Kemudian Tiongkok sendiri memiliki ambisi untuk menguasai ekonomi dunia dan bersaing dengan kekuatan ekonomi dunia lainnya. Propaganda anti

Tiongkok di Indonesia saat ini telah mereda jika dibandingkan dengan situasi pada 1998 namun dinilai masih mudah disulut di tengah masyarakat. Selain itu, sentiment tersebut tidak terlalu mengganggu proses kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok namun pihak Pemerintah Tiongkok pernah menyatakan keberatan atas adanya propaganda anti Tiongkok di Indonesia. Kemudian propaganda pada media sosial, media cetak maupu media massa pada saat ini memicu pergerakan atau tindakan-tindakan anarkis. Namun demikian perlu diwaspadai pihak-pihak yang berpotensi menjadi aktor propaganda diantaranya kelompok kepentingan, kelompok konservatif yang berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, buruh dan NGO dari negara yang berkedudukan sebagai rival dari Tiongkok. Selain itu, berdasarkan hasil studi literatur juga menunjukkan bahwa propaganda anti Tiongkok di Indonesia dapat dinilai sebagai *proxy war* dari rivalnya dalam geopolitik, yaitu Amerika Serikat. Pada saat ini intensitas sentiment anti Tiongkok juga dinilai rendah, oleh karena itu, ancaman tersebut dapat digolongkan pada tingkatan minor yaitu ancaman dalam sembilan komponen intelijen strategis terhadap suatu daerah yang dampaknya tergolong kecil. Namun demikian perlu tetap diantisipasi, dideteksi dan dicegah secara dini jika isu anti Tiongkok muncul disuatu daerah karena dapat berkembang menjadi massif dan memicu konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- al Qurtuby, S. (2017). *Sentimen Anti-Cina di Indonesia*. Diakses dari: <https://www.dw.com/id/sentimen-anti-cina-di-indonesia/a-36974659>
- Alwi, H. (2016). *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoretis*. IAIN Mataram.
- American, T., Science, P., & Aug, N. (2008). The Theory of Political Propaganda Harold D. Lasswell. *Political Science*, 21(3), 627–631.
- Bahtiar, A., Purwadianto, A., & Juwono, V. (2021). Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 178–192.
- Bowser, B. P. (2017). *Racism : Origin and Theory*. <https://doi.org/10.1177/0021934717702135>
- BPS RI. (2023). *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*. Diakses dari: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table?subject=535>
- Collins, J. M. (1994). *Special Operation Forces An Assessment*. National Defense University Press.
- Creswell, J. W., & David, J. (2018). *Mixed Methods Procedures*.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press.
- Ellul, J. (1973). *Propaganda: The Formation of Men's Attitudes*. Vintage Books. Vintage Books.
- Granieri, R. J. (2018). *The Ambivalent Alliance Chinese Policy towards Indonesia, 1960-1965*. The Ambivalent Alliance.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2022). *Indonesia dan Tiongkok Sepakati Lima Dokumen Kerja Sama*. Diakses dari: <https://setkab.go.id/indonesia-dan-tiongkok-sepakati-lima-dokumen-kerja-sama/>
- Jowett S., G., & O'Donnel, V. (2012). Propaganda and Persuasion. In *Journal of Broadcasting & Electronic Media* (Fifth Edit, Vol. 44, Nomor 2). SAGE. <https://hiddenhistorycenter.org/wp-content/uploads/2016/10/PropagandaPersuasion2012.pdf>
- kbbi.web.id. (2023). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/>. <https://kbbi.web.id/deteksi>
- KBRI Tiongkok. (2022). Optimalkan Hubungan Perdagangan Indonesia dan Tiongkok, KBRI Beijing Fasilitasi Kegiatan Penandatanganan Kerja Sama antar Pelaku Usahaitle.

- kemlu.go.id. <https://www.kemlu.go.id/beijing/id/news/22066/optimalikan-hubungan-perdagangan-indonesia-dan-tiongkok-kbri-beijing-fasilitasi-kegiatan-penandatanganan-kerja-sama-antar-pelaku-usaha>
- Liu, H. (2015). *Sukarno, Tiongkok, & Pembentukan Indonesia (1949-1965)*. Komunitas Bambu.
- Pertiwi, M. (2021). Perkembangan Sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. *KAGANGA KOMUNIKA: Journal of Communication Science*, 3(1), 82-93.
- Praditya, I. I. (2023). *Disaksikan Jokowi, Indonesia dan China Sepakati Kerja Sama Ekonomi Digital*. Diakses dari: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5396274/disaksikan-jokowi-indonesia-dan-china-sepakati-kerja-sama-ekonomi-digital?page=2>
- Prunckun, H. (2010). *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis (Scarecrow Professional Intelligence Education Series) (Education)*. The Scarecrow Press, Inc.
- Satryo, A. (2023). *Gara-gara IKN Diobral ke China, KAMI Lintas Provinsi Bela Kritikan RG ke Jokowi*. Diakses dari: <https://politik.rmol.id/read/2023/08/10/584596/gara-gara-ikn-diobral-ke-china-kami-lintas-provinsi-bela-kritikan-rg-ke-jokowi>
- Sugirman, S. (2009). *Analisis Intelijen: Sebuah Kontemplasi*. CSICI.
- Suryadinata, L. (2021). *How a hoax pandemic donation sparked anti-Chinese and anti-China sentiments in Indonesia*. Diakses dari: <https://www.thinkchina.sg/how-hoax-pandemic-donation-sparked-anti-chinese-and-anti-china-sentiments-indonesia>
- Suryana, W. (2023). *Survei Indostrategis, Publik Dominan Respons Negatif IKN dan Kereta Cepat*. Diakses dari: <https://news.republika.co.id/berita/rxtjtb484/survei-indostrategis-publik-dominan-respons-negatif-ikn-dan-kereta-cepat>
- Undang-Undang No 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Utami, R. (2015). *Hubungan Indonesia-Tiongkok: dari Soekarno hingga Jokowi*. Diakses dari: <https://www.antaraneews.com/berita/490460/hubungan-indonesia-tiongkok-dari-soekarno-hingga-jokowi>
- Van de Weert, A., & Eijkman, Q. A. (2020). Early detection of extremism? The local security professional on assessment of potential threats posed by youth. *Crime, Law and Social Change*, 73, 491-507.
- Yudhana. (2009). *Deteksi Dini dalam Intelijen*. Sinar Baru Press.